

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sepak bola tidak hanya hadir sebagai cabang olahraga atau sarana hiburan semata, melainkan juga telah menjadi instrumen penting dalam membangun solidaritas sosial, identitas kolektif, serta pengaruh politik dalam suatu masyarakat.

Hubungan sepak bola sebagai pembangkit munculnya solidaritas sosial di Indonesia mulai terlihat dari sejak sebelum kemerdekaan, tepatnya pada era kolonialisme Belanda. Lahirnya organisasi sepak bola Indonesia yaitu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) pada 19 April 1930 sebagai sebuah bentuk bersatunya perkumpulan *bond-bond*¹ Indonesia yang tidak setuju dengan pengelolaan sepakbola di Nusantara oleh *NIVB (Nederlandsch Indische Voetbal Bond)* yaitu organisasi sepak bola yang didirikan oleh orang-orang Belanda dan hanya berkembang di kota-kota besar saja terutama di pulau Jawa.²

Dua tahun setelah berdirinya PSSI, tepatnya di tahun 1932, merupakan puncak perlawanan insan sepak bola Indonesia terhadap *NIVB*, dengan cara memboikot peliputan berita pertandingan liga sepak bola *NIVB* oleh pers, yang dimotori oleh pers Tionghoa, karena mereka sadar kepentingan nasional lebih utama dari pada kepentingan penjajah.³ Pemerintah Kolonial Belanda pun

¹ Arti kata "bond" jika diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia dalam kamus Belanda-Indonesia adalah Perserikatan

² Eddi Elison, *PSSI: Alat Perjuangan Bangsa*, (Jakarta: Mullya Angkasa 2005) hlm. 25

³ Srie Agustina Palupi, *Politik dan Sepakbola: di Jawa 1920-1942*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 79-90

menyadari bahwa pemberian ruang bagi sepak bola Indonesia tak ubahnya seperti pemberian ruang bagi berkembangnya ide-ide kemerdekaan Indonesia, sehingga setelah itu banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial dengan membatasi atau bahkan melarang pertandingan PSSI.⁴

Selain di Indonesia, kekuatan sepak bola sebagai sarana perjuangan politik juga terlihat dalam kasus Bangsa Catalan di Spanyol. Salah satu contohnya adalah FC Barcelona, klub sepak bola yang tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Catalan, tetapi juga dijadikan simbol perlawanan terhadap dominasi pemerintah pusat Spanyol yang direpresentasikan oleh klub Real Madrid. Pertandingan antara FC Barcelona dan Real Madrid, yang dikenal dengan sebutan *El Clasico*, sering kali sarat dengan nuansa politik, separatisme, dan semangat kebangsaan. Dalam momen tersebut, suporter Catalan kerap menyerukan kebebasan dan otonomi daerah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola mampu menjadi media untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan cita-cita bersama dalam perjuangan politik suatu bangsa.

Sepak bola juga berperan sebagai sarana untuk mengangkat citra suatu negara di mata dunia internasional. Negara yang semula kurang dikenal dapat menarik perhatian global apabila menunjukkan prestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola.⁵ Pada tingkat lokal, sepak bola berfungsi sebagai representasi identitas suatu daerah. Klub sepak bola sering kali dianggap sebagai

⁴ Palupi, *Ibid*, hlm. 85

⁵ Dody Dwi Adhilaksono, *Persija (1970–1990): Dinamika Perkembangan Sepak Bola di Jakarta*, (Universitas Indonesia: Skripsi 2012), hlm. 1.

perwakilan dari kota atau wilayah asalnya, sehingga keberadaannya sangat terkait dengan identitas daerah tersebut. Salah satu bentuk keterkaitan tersebut terlihat dari penggunaan lambang daerah pada logo klub, terutama pada era perserikatan. Misalnya, Persema Malang menggunakan lambang tugu Malang, sementara Persebaya Surabaya menampilkan simbol Sura (hiu) dan Baya (buaya) sebagaimana lambang Pemerintah Kota Surabaya. Meskipun saat ini klub-klub sepak bola diharapkan mandiri secara profesional, penggunaan simbol daerah tersebut menunjukkan bahwa hubungan emosional dan identitas kedaerahan tetap melekat kuat dalam tubuh klub.⁴

Kepopuleran sepak bola sering kali menumbuhkan fanatisme di kalangan penggemarnya. Fanatisme ini bersifat unik, karena para suporter rela mengorbankan tenaga, waktu, bahkan dana demi mendukung tim kesayangan mereka.⁶ Di Indonesia, bentuk fanatisme ini terlihat jelas melalui keberadaan berbagai komunitas suporter yang tersebar di hampir setiap klub sepak bola. Eksistensi suporter telah menjadi bagian penting dalam budaya sepak bola nasional, sehingga muncul ungkapan bahwa tidak ada kesebelasan tanpa suporter.

Fenomena serupa juga terjadi di Kota Jambi, di mana masyarakat menunjukkan kecintaan yang kuat terhadap sepak bola, sebagaimana yang terlihat di daerah-daerah lain di Indonesia. Dukungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek olahraga semata, melainkan juga mencerminkan semangat untuk memperjuangkan eksistensi dan identitas daerah. Kecintaan ini bahkan melahirkan

⁶ Iskandar, Muhaimin, *Spiritualitas Sepak Bola* (Yogyakarta: KLIK.R, 2006), hlm. 41-43

aksi-aksi gerakan sosial yang bertujuan untuk mendorong kemajuan sepak bola di wilayah tersebut. Di Kota Jambi, hal ini diwujudkan melalui terbentuknya komunitas suporter bernama Koja Mania (Kota Jambi Mania), yang klub mana pun yang membawa nama Kota Jambi/ Jambi sebagai identitasnya. Komunitas ini berdiri pada Januari 2011, berawal dari kegelisahan sekelompok pemuda yang prihatin karena minimnya dukungan masyarakat terhadap klub lokal yang sedang bertanding. Dari keresahan inilah, lahir gerakan kolektif yang kemudian membentuk Koja Mania sebagai wadah perjuangan suporter sepak bola di Jambi.⁷

Koja Mania memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan sepak bola di Kota Jambi. Selain berfungsi sebagai kelompok pendukung klub, keberadaan mereka juga mampu menyatukan pemuda dan masyarakat dalam satu semangat kebersamaan untuk mendukung tim sepak bola daerah. Semangat yang ditunjukkan oleh Koja Mania mencerminkan rasa bangga dan kecintaan terhadap Kota Jambi, serta tekad untuk membangun citra daerah melalui olahraga. Tidak sedikit anggotanya yang rela mengorbankan biaya, waktu, dan tenaga demi memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, bentuk dukungan yang diberikan suporter terkadang melampaui batas logika rasional, namun tetap dilandasi oleh loyalitas dan ikatan emosional yang kuat terhadap klub yang mereka bela.

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi dapat dikatakan tertinggal dalam hal pengembangan sepak bola jika dibandingkan dengan kota-kota besar lain di

⁷ Hidayat, "*Komunitas Koja mania: Transisi organisasi suporter modern 2011-2017*, (Universitas Jambi: Skripsi 2018), hlm. 3.

Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Saat ini, tidak ada satu pun klub sepak bola profesional yang mewakili Jambi di kompetisi nasional, baik di Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3. Kondisi ini kontras dengan kota-kota lain seperti Banda Aceh (Persiraja), Medan (PSMS Medan), Padang (Semen Padang), Pekanbaru (PSPS), Palembang (Sriwijaya FC), hingga Lampung (Badak Lampung FC dan Bhayangkara Presisi Lampung FC), yang secara aktif berkompetisi di tingkat nasional. Padahal, jika melihat dari potensi wilayah, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi, Kota Jambi seharusnya mampu bersaing dan membangun iklim sepak bola yang profesional. Kurangnya atmosfer kompetisi dan perhatian terhadap pengembangan sepak bola di daerah ini membuat kelompok suporter seperti Koja Mania seolah kehilangan arah dan tujuannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, untuk membangun kembali ekosistem sepak bola yang lebih baik di Kota Jambi.

Berbeda dengan daerah-daerah lain yang menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah dalam membangun sepak bola secara profesional, Kota Jambi hingga kini belum menunjukkan langkah konkret yang sepadan. Misalnya, di Kabupaten Luwu Utara, pemerintah daerah berperan penting dalam pembinaan sepak bola melalui alokasi dana hibah kepada KONI, penyediaan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan, serta penyelenggaraan kompetisi usia dini untuk mencetak bibit unggul.⁸ Hal serupa juga dilakukan di Kota Makassar, di mana pemerintah kota membangun kemitraan strategis dengan klub PSM Makassar melalui fasilitasi

⁸ Sulhan Akbar, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga di Kabupaten Luwu Utara: Studi Peningkatan Prestasi Olahraga Sepak Bola*, (Universitas Hasanuddin: Skripsi 2023)

stadion, dukungan brand daerah, dan pemberian dana hibah, bahkan membuka peluang pembentukan BUMD olahraga sebagai bentuk dukungan institusional terhadap profesionalisme klub.⁹ Kebijakan nasional melalui Inpres No. 3 Tahun 2019 juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran, infrastruktur, dan pusat pelatihan guna mempercepat pembangunan sepak bola nasional.¹⁰ Sayangnya, di Kota Jambi, inisiatif tersebut justru lebih dominan muncul dari masyarakat sipil, khususnya komunitas suporter Koja Mania. Tidak hanya mendukung tim secara emosional, Koja Mania juga berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang terus menyuarakan aspirasi agar pemerintah terlibat aktif dalam membangun iklim sepak bola yang sehat dan profesional di Jambi. Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah minimnya perhatian dari pemangku kebijakan, kelompok suporter dapat mengambil peran strategis dalam mendorong perubahan melalui gerakan sosial berbasis identitas dan kepedulian lokal.

Loyalitas dan fanatisme Koja Mania dalam mendukung kemajuan sepak bola di Kota Jambi dapat dipahami melalui ikatan emosional yang kuat terhadap identitas kedaerahan. Dukungan tersebut bukan semata-mata lahir dari kecintaan terhadap olahraga, tetapi juga karena adanya keinginan untuk merasakan atmosfer kompetisi sepak bola nasional yang lebih profesional. Dalam konteks gerakan sosial, kelompok seperti Koja Mania dapat dikategorikan sebagai *pressure group*

⁹ Mohamad Fadli, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Klub Sepak Bola Profesional di Kota Makassar*, (Universitas Negeri Makassar : Tesis 2020)

¹⁰ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019* tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

atau kelompok penekan, yaitu sekelompok individu yang berorganisasi untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi kebijakan demi kepentingan bersama.¹¹ Apa yang dilakukan oleh Koja Mania menunjukkan bahwa sepak bola dapat menjadi arena perjuangan antara masyarakat dan penguasa.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam gerakan suporter *Corrillo Ultras* dan *Supporter Crew* di Freiburg, Jerman. Kelompok ini secara aktif mengkampanyekan isu-isu sosial melalui koreografi, pengibaran spanduk, serta penyebaran pesan lewat media sosial. Salah satu aksi mereka yang paling dikenal adalah koreografi bertuliskan “*FIFA Abolish Racism Fights*” pada pertandingan melawan Eintracht Frankfurt pada Agustus 2016, sebagai bentuk kritik terhadap pembiaran FIFA terhadap kasus diskriminasi dan rasisme. Selain itu, *Corrillo Ultras* juga aktif dalam demonstrasi melawan ideologi sayap kanan, seksisme, dan homofobia, serta mendukung isu pengungsi sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.¹² Hal ini menunjukkan bahwa komunitas suporter, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dapat memainkan peran penting dalam menyuarakan isu-isu sosial dan membangun kesadaran kolektif di luar stadion.

Selanjutnya pemerintah daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong kemajuan sepak bola di wilayahnya. Hal ini ditegaskan melalui *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019* tentang Percepatan

¹¹ Situmorang, Abdul Wahib. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 112.

¹² Studi kasus gerakan ultras dalam sepak bola Jerman, dikutip dalam Galuh, M. D., *Media Sosial dan Aktivisme Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 60–62.

Pembangunan Persepakbolaan Nasional, yang mewajibkan kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD guna pembangunan sarana dan prasarana sepak bola berstandar internasional, pendirian pusat pelatihan (*training center*), serta pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi kelompok umur dan amatir.¹³ Instruksi ini juga mengarahkan pemerintah daerah agar mengacu pada peta jalan (*road map*) yang disusun bersama oleh Kemenko PMK dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan kebijakan tersebut, kepala daerah dituntut aktif berperan dalam mendukung pembangunan sepak bola. Dalam praktik politik, kedekatan seorang elite dengan tim sepak bola lokal dapat meningkatkan citra positif mereka di mata masyarakat.¹⁴ Masyarakat cenderung menilai secara positif pemimpin yang terlihat peduli terhadap tim sepak bola daerah, karena keterlibatan tersebut menciptakan kedekatan emosional antara pemimpin dan konstituen melalui simbol kebanggaan bersama, yakni klub sepak bola lokal.¹⁵

Berdasarkan ketentuan *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019*, kepala daerah dituntut aktif dalam pembangunan sepak bola melalui penyediaan anggaran, fasilitas, dan program pembinaan. Dalam konteks politik, kedekatan antara elite politik dan tim sepak bola lokal sering kali menjadi keuntungan elektoral, karena masyarakat cenderung memberikan penilaian positif terhadap pemimpin yang menunjukkan kepedulian terhadap olahraga daerah.¹⁶ Dukungan terhadap klub

¹³ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019* tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

¹⁴ Kiki Perdana Esa, *Sepakbola Sebagai Bentuk Baru Komunikasi Politik Indonesia*, Jurnal Riset Komunikasi, 2021, hlm. 58.

¹⁵ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 72.

¹⁶ Esa, *Ibid*, hlm. 58.

sepak bola lokal dapat menciptakan kedekatan emosional antara pemimpin dan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi politik di tingkat lokal.

Fenomena ini terlihat di Kota Jambi pada masa kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha periode 2013–2018. Ia secara terbuka menyatakan keinginannya membentuk klub sepak bola profesional yang mewakili Kota Jambi di tingkat nasional. Dalam pernyataannya, Fasha menyampaikan, “Saya ingin buat klub sepak bola lagi, saya ingin bahwa Jambi ini bisa berlaga di tingkat nasional. Saya malu juga dengan teman-teman daerahnya kecil-kecil dan baru pemekaran tetapi klub mereka ada di liga.”¹⁷ Rencana tersebut sempat menumbuhkan harapan besar, khususnya bagi kelompok suporter Koja Mania yang selama lebih dari satu dekade hanya menyaksikan klub kebanggaan mereka berlaga di tingkat lokal antar kabupaten/kota. Namun hingga akhir masa jabatannya dua periode, rencana pembentukan klub profesional tersebut tidak pernah terealisasi. Kegagalan ini menciptakan kekecewaan sekaligus menunjukkan belum maksimalnya komitmen politik dalam pembangunan sepak bola di Kota Jambi.

Fenomena keterkaitan antara sepak bola dan politik ini juga terjadi di daerah lain. Misalnya, dalam penelitian oleh Nihayatus Sa’adah tentang keterlibatan LA Mania dalam Pemilu Pilkada Lamongan 2010, ditemukan bahwa calon Bupati Fadeli berhasil memanfaatkan dukungan suporter sepak bola sebagai strategi politik. Selain didukung partai politik, Fadeli merangkul komunitas LA Mania sebagai

¹⁷ Aksi Post, “Wali Kota Fasha Siap Bentuk Tim Sepak Bola Jambi Ikuti Ajang Liga Nasional,” <https://www.aksipost.com/arsip/20045>, diakses 08 April 2022.

kekuatan elektoral untuk memenangkan kontestasi.¹⁸ Sebaliknya, sepak bola juga dapat memengaruhi peta kekuatan politik secara negatif, seperti yang terjadi pada Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024. Ganjar, yang saat itu mencalonkan diri sebagai Presiden, kalah suara di banyak wilayah, termasuk dari kalangan pecinta sepak bola. Salah satu penyebabnya diyakini berasal dari pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA, yang dipicu oleh penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel oleh beberapa kepala daerah, termasuk Ganjar Pranowo dan Wayan Koster.¹⁹ Meskipun penolakan tersebut lebih bersifat politis dan ideologis, banyak masyarakat menilai keputusan itu merugikan sepak bola nasional dan menjadi faktor turunnya dukungan terhadap Ganjar di kalangan pemilih muda dan pecinta sepak bola.

Jika ditinjau dari sejumlah penelitian sebelumnya, seperti studi mengenai peran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pengembangan sepak bola, keterlibatan suporter LA Mania dalam Pilkada Lamongan 2010, gerakan sosial kelompok ultras Corrillo di Freiburg, serta keterlibatan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung klub profesional PSM Makassar, terdapat beberapa kesamaan tema dengan penelitian ini. Kesamaan tersebut meliputi isu pembangunan sepak bola, peran suporter sebagai aktor politik, dan relasi antara olahraga dan kekuasaan. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus dan konteks yang berbeda. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran

¹⁸ Nihayatus Sa'adah, *Sepak Bola dan Politik: Keterlibatan LA Mania dalam Pemenangan Kandidat Pemilukada Lamongan 2010*.

¹⁹ Suara.com, "Piala Dunia U-20 Dianggap Jadi Salah Satu Alasan Ganjar Pranowo Kalah Suara," <https://www.suara.com/kotaksuara/2024/02/15/115821>, diakses 23 Februari 2025.

dan keterlibatan kelompok suporter Koja Mania dalam mendorong pembangunan sepak bola di Kota Jambi. *Kedua*, penelitian ini ingin membedah gerakan sosial yang dilakukan Koja Mania serta bagaimana gerakan tersebut berelasi dengan struktur kekuasaan lokal, khususnya dalam konteks minimnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sepak bola profesional di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai ***“Gerakan Sosial Koja Mania dalam Upaya Membangun Sepak Bola di Kota Jambi”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pola dan bentuk dari gerakan Sosial Koja Mania?
- 1.2.2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat gerakan sosial Koja Mania dalam dalam upaya membangun sepak bola di Kota Jambi ?
- 1.2.3. Bagaimana strategi Koja Mania dalam mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam upaya membangun sepak bola di Kota Jambi ?

1.3. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk Mengetahui bagaimana pola dan bentuk dari gerakan sosial Koja Mania
- 1.3.2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat dari gerakan sosial Koja Mania
- 1.3.3. Untuk mengetahui strategi Koja Mania mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan bahan rujukan dan bahan kajian khususnya untuk akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan memahami mengenai sosial politik yang ada di Provinsi Jambi, Kota Jambi dan di Indonesia dalam bingkai olahraga

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas serta untuk memperluas wawasan bagi penulis serta untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi.

1.5. Landasan Teori

Landasan teori merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian.

1.5.1. Gerakan Sosial

Dalam peta teori Ilmu Sosial tentang penjelasan konsep gerakan sosial memiliki beragam pemahaman, beberapa pakar sosiologi mengartikan gerakan sosial merupakan bentuk dari sebuah tindakan kolektif. Dalam rana kepentingan yang berbeda perlawanan secara umum melahirkan sebuah istilah perjuangan kelas yang menggambarkan sebuah kelas yang dikuasai atau didominasi akan melakukan perlawanan dan mengambil alih kebijakan. Maka pemahaman Gerakan sosial diantaranya sebagai berikut gerakan sosial atau *social movement* adalah sebuah aktivitas yang diorganisir yang ditunjuk sebagai sebuah Tindakan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*).²⁰

Dari pemahaman ini dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan sosial yang dikemukakan oleh Macionis memiliki dua ciri khas utama yakni:

1. Adanya gerakan yang diorganisir dan
2. Memiliki tujuan yang berkaitan dengan perubahan sosial.

²⁰ Sukmana, Oman, *Konsep dan teori gerakan sosial*, (Malang:Intrans Publishing 2016), Hlm.11.

Defenisi lain mengatakan bahwa gerakan sosial (*social movement*) merupakan upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan baru Spencer (1982). Pemahaman yang di tawarkan Spencer memiliki ciri utama yakni adanya upaya kolektif (bersama) yang ditujukan untuk terjadinya arah perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya.²¹

Menurut Tilly unsur penting dalam gerakan sosial adalah kondisi hubungan pertentangan (*contention relation*). Tilly menjelaskan bahwa aksi kolektif merupakan aksi yang dilakukan kelompok yang dilakukan bersama-sama demi mencapai tujuan bersama.²² Tilly memetakan beberapa point penting yang dipakai sebagai dasar gerakan sosial, yakni;

1. Gerakan sosial adalah gerakan yang teorganisir
2. Gerakan sosial selalu memiliki tujuan untuk membuat perubahan social atau mempertahankan suatu kondisi
3. Tindakan-tindakan dalam gerakan sosial merupakan Tindakan yang terorganisir
4. Tindakan dalam gerakan sosial merupakan Tindakan menentang secara berkelanjutan
5. Gerakan sosial melakukan klaim secara terbuka
6. Aksi perlawanan dalam gerakan sosial akan berlangsung secara terus menerus dan berulang

²¹ Oman, *Ibid*, hlm.14

²² Charles Tilly dan Sidney Tarrow, *Contentious Politics edition*. (Amerika: Press Universitas Oxford 2015), hlm.145.

7. Gerakan sosial merupakan gerakan yang melestarikan politik perlawanan dan tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung
8. Gerakan sosial berkembang dan bertahan karena memiliki solidaritas dan identitas Gerakan

Sedangkan Menurut Rajendra Singh (2001), menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan sebuah bentuk mobilisasi dalam rangka menentang negara dengan sistem pemerintahannya, yang tidak selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan, bersenjata seperti halnya dalam kasus kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Umumnya gerakan sosial menyatakan dirinta dalam kerangka demokratik.

Kemudian Singh membagi gerakan sosial dalam beberapa bagian, yakni:²³

1. Klasik (*Classical*): Gerakan Sosial dalam perspektif klasik ini meliputi sebagian besar studi-studi tentang perilaku kolektif dari kerumunan, kerusuhan, dan kelompok pemberontak.
2. Neo-klasik (*The Neo-Classical*) masih dikaitkan dengan tradisi utama dalam studi-studi Gerakan Sosial Lama (Old Social Movements) serta pada umumnya tulisan-tulisan tradisi neo-klasik banyak dipublikasikan setelah era tahun 1950-an.

²³ Rejedra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, terj. Eko P Darmawan (Yogyakarta: Resist Book 2010). Hlm. 111

3. Kontemporer (*Contemporary*): dikaitkan dengan era Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*). Studi-studi mengenai diskursus ini banyak dipelajari oleh masyarakat di Amerika dan Eropa pada tahun 1960-an dan 1970-an. Di era itu gerakan sosial muncul dengan skala yang lebih besar dengan memprotes isu-isu mendasar mengenai humanis, kultural dan non-materialistik.

1.5.2. Gerakan Sosial Baru

Pada abad ke 20 muncul gerakan dan perlawanan terhadap dominasi politik yang lebih variatif dan kompleks dengan intensitas semakin bertambah. Muncul gerakan memperjuangkan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1955-1968, setelah itu muncul banyak gerakan yang memperjuangkan anti perang, lingkungan, feminisme dan lain sebagainya.²⁴

Teori Gerakan Sosial Baru memiliki beberapa ciri utama yang pertama, ia menempatkan aksi gerakan sosial menjadi suatu aksi kolektif yang memiliki nilai positif dan rasional. Kedua, mengoreksi dan mengkonsepkan kembali teori-teori gerakan sosial yang jauh sebelumnya sudah ada, misalnya teori eksploitasi kelas oleh Karl Marx menjadi teori keluhan yang lebih cocok digunakan di era kontemporer, hal ini menjelaskan bahwa aksi-aksi kolektif tidak hanya didorong oleh eksploitasi kelas terhadap buruh oleh pemilik alat produk. Ketiga, kajian gerakan sosial kian beraneka ragam karena semakin banyaknya praktek gerakan dan studi

²⁴ Singh, *Ibid*, hlm.111

gerakan sosial di luar wilayah Amerika dan Eropa. Keempat, Gerakan Sosial Baru dapat dengan rinci mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi berkembangnya sebuah gerakan, kekuatan atau kelemahan dan keberhasilan atau ketidakberhasilan dari suatu gerakan sosial.²⁵

Gerakan Sosial Baru secara esensial bersifat universal, yang mana diarahkan memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan Gerakan Sosial Lama, maka model gerakan sosial baru tidak terjebak pada diskursus ideologi seperti anti kapitalisme (anti *capitalism*), revolusi kelas (*class revolution*) dan perjuangan kelas (*class struggle*).²⁶

Kemudian Larana, Johnston dan Gusfield memaparkan mengenai karakteristik gerakan sosial baru atau New Social Movement, yakni:

1. *New Social Movements* (NSMs) tidak berhubungan dengan peran struktural dari partisipan (*participants*) gerakan. Kecenderungan basis sosial dari *New Social Movements* (NSMs) adalah bersifat melampaui struktur kelas (*class structure*). Latar belakang dari partisipan ditemukan menyebar dalam berbagai status sosial, seperti pemuda (*youth*), gender (*gender*), orientasi seksual (*sexual orientation*), atau kalangan profesional

²⁵ Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 60

²⁶ Oman, *Ibid*, hlm. 124

(*professional*), yang tidak berhubungan dengan penjelasan struktural (*structural explanations*).

2. Karakteristik ideologi dari *New Social Movements* (NSMs) bertolak belakang dengan ideologi gerakan kelas pekerja (*the working class movements*) dan konsepsi ideologi Marxist sebagai elemen penyatuan dan totalitas untuk tindakan kolektif (*collective action*). Khususnya di Eropa dan juga di Amerika Serikat, gerakan ditandai oleh karakteristik ideologi: *conservative* atau *liberal*, *right* atau *left*, *capitalist* atau *socialist*. Pandangan Marxis lebih dominan di Eropa daripada di Amerika, mengarahkan paradigma untuk membentuk persepsi tentang tindakan baik borjuis atau proletar. Memberikan batasan terhadap *New Social Movements* (NSMs) akan lebih sulit karena ide-ide dan nilai-nilainya lebih plural, cenderung memiliki orientasi yang pragmatis, dan berupaya untuk melakukan reformasi kelembagaan dimana semakin terbukanya sistem bagi partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.
3. Seringkali menyangkut dimensi identitas baru. Faktor mobilisasi lebih cenderung mengarah kepada isu-isu simbolis dan kultural yang dikaitkan dengan isu-isu tentang identitas daripada keluhan-keluhan ekonomi sebagaimana menandai gerakan kelas pekerja.
4. Menyangkut aspek-aspek personal dan erat dengan kehidupan manusia. Gerakan-gerakan yang berfokus dalam hak-hak kaum

gay dan aborsi, gerakan kesehatan termasuk pengobatan alternatif dan anti merokok, gerakan transformasi diri dan usia baru (*new age and transformation movements*), dan gerakan kaum wanita, semuanya bertujuan untuk merubah perilaku fisik dan seksual. Gerakan juga diperluas ke dalam arena kehidupan sehari-hari, seperti: bagaimana kita makan, berpakaian, dan santai; bagaimana kita mencintai, mengatasi masalah pribadi, atau perencanaan karier.

5. Ciri-ciri umum lainnya dari *New Social Movements* (NSMs) adalah dalam menggunakan taktik mobilisasi terhadap gangguan dan hambatan yang berbeda dari praktek mobilisasi gerakan kelas pekerja (*working-class movement*). *New Social Movements* (NSMs) menggunakan pola mobilisasi baru yang diwarnai oleh anti-kekerasan dan pembangkangan sipil (*nonviolence and civil disobedience*)

1.5.3. Gerakan Sosial dalam Perubahan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kaitan ini merupakan esensi dari hubungan negara dengan warganya di dalam suatu sistem politik tertentu. Ketika berbicara tentang negara, mau tidak mau kita akan menyinggung secara lebih spesifik kepada kebijakan publik.

Menurut Arief Budiman, kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan negara dan cara pengambilan

keputusannya, orang-orang atau kelompok- kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi.²⁷ Batasan ini tampaknya berdekatan dengan definisi Dye (2004) yang menyatakan kebijakan publik sebagai apapun keputusan negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁸ Kemudian Meyer (2007) mendefinisikan sebagai beraksi atau tidaknya pemerintah.²⁹ Meskipun belum menjadi titik fokus, kebijakan publik sebenarnya telah menjadi titik perhatian para peneliti gerakan sosial.

Meskipun harus diakui, kebijakan publik masih menjadi kajian minor dalam studi-studi mereka, katakanlah bila dibandingkan dengan perubahan sosial, politik, kultur, dan sebagainya yang lebih makro. Beberapa studi gerakan sosial di tahun 1960 dan 1970-an, misalnya sudah mulai memberi fokus pada kebijakan sebagai hasil mobilisasi protes sosial.

Michael Lipsky (1970) dalam menyatakan protes merupakan strategi politik bagi masyarakat yang diposisikan tidak adil untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui cara-cara yang konvensional. Demikian pula (Piven dan Cloward, 1971) secara langsung menunjukkan kaitan antara kebijakan kesejahteraan pemerintah terhadap kaum miskin, untuk memelihara ketentraman sosial dan menghindari

²⁷ Arief Budiman, *Teori negara: negara, kekuasaan dan ideologi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2002), hlm. 89.

²⁸ Thomas Dye, *Understanding Public Policy*, (New York: Oxford University Press 2004), hlm, 15.

²⁹ Mayer Henry, *Manajemen dengan kecerdasan emosional*, (Bandung : Medium 2007), hlm.172.

protes. Menurut mereka, mempertahankan kesejahteraan adalah usaha yang penting dari pemerintah untuk mempertahankan perdamaian sosial, keputusan kebijakan untuk menghindari protes. Mereka juga menunjukkan protes yang mengacaukan merupakan cara yang paling baik yang tersedia bagi kaum miskin untuk memengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan mereka sebab kebijakan kesejahteraan adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk membeli agar mereka diam.³⁰

Sementara itu, (Della Porta dan Diani, 1999) menyatakan hal pertama untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh gerakan sosial adalah perubahan kebijakan yang kemudian ditimbulkannya. Umumnya, menurut mereka, gerakan sosial dibangun untuk merefleksikan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang sedang berlangsung. Lebih konkret lagi, menurut mereka, dampak Gerakan sosial ini bisa dilihat dari adanya keputusan baru dan apakah keputusan itu benar-benar dilaksanakan.³¹

Gamson (1975) menyebutkan keberhasilan gerakan sosial dapat dilihat dari dua sisi, yakni adanya capaian-capaian baru dan tingkat akseptasi. Yang pertama, menyangkut perubahan nyata kebijakan publik untuk merespons tuntutan dan protes, sedangkan yang kedua, bagaimana gerakan membawa hasil nyata di dalam sistem perwakilan kepentingan.³²

³⁰ Manalu Dimpos, *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara*, Jurnal Populasi Volume 18 No 1 2007, hlm. 37.

³¹ Della Porta dan Mario Diani, *Social Movement: An Introduction*, (UK: Blakwell Publishing 1999), hlm. 233.

³² Manalu, *Ibid*, hlm.37.

Oleh Gamson, kedua variabel itu dibedakan menjadi empat tipologi kesuksesan:

1. Pencapaian dan akseptasi sekaligus;
2. Pengakuan tanpa pencapaian;
3. Pencapaian tanpa pengakuan; dan
4. Tanpa pengakuan dan pencapaian sekaligus

Berangkat dari kaca mata kebijakan publik, Schumaker (1975) dalam Burstein, dkk³³ dan Della Porta dan Diani³⁴ memberikan tipologi yang lebih spesifik menyangkut dampak atau keberhasilan gerakan sosial dalam memengaruhi kebijakan.

1. Terbukanya akses, yakni mengindikasikan tingkat ketika pemilik otoritas (target) bersedia mendengarkan tuntutan organisasi gerakan.
2. Respons di tingkat agenda ketika target atau pemilik otoritas rela menempatkan tuntutan gerakan pada agenda politiknya.
3. Respons kebijakan, yakni ketika pemilik otoritas mengadopsi kebijakan baru (khususnya legislasi) yang kongruen dengan
4. Hasil yang dicapai, yakni jika pemilik otoritas secara efektif mengimplementasikan kebijakan baru.

³³ Burstein Paul dkk, *The success of political movements: A bargaining perspective* (Minneapolis : University of Minnesota Press 1995), hlm. 228.

³⁴ Porta, *Ibid*, hlm 234

5. Dampak yang terjadi, yakni tingkat ketika aksi-aksi maupun respons sistem politik berhasil meredakan dan menjawab tuntutan gerakan.

Berdasarkan skema yang ditawarkan Schumaker ini, kemudian Burstein, dkk mengembangkan respons kebijakan tersebut menjadi tipe-tipe, sebagai berikut;

Tabel. 1
Respon Kebijakan Menurut Burstein

Tipe	Contoh
Akses	Partisipan gerakan menyampaikan petisi dalam rapat dengar pendapat di parlemen/kongres
Agenda	Daftar tuntutan diperkenalkan di parlemen
Kebijakan	Legislasi yang diharapkan diadops
Hasil	Legislasi diselenggarakan sebagaimana diharapkan gerakan
Dampak	Legislasi mencapai konsekuensi- konsekuensi yang diharapkan
Struktural	Perubahan sistem dan meningkatnya pengaruh gerakan

Akan tetapi, berbeda dengan tahapan dan siklus yang dikenal di dalam teori-teori kebijakan konvensional, dalam hal ini kesuksesan sebuah gerakan sosial dipahami tidak berlangsung secara linear. Pilihan-pilihan strategi gerakan dan besarnya sumber daya yang dikerahkan, misalnya, amat berdampak pada hasil atau respons yang dicapai. Sumber daya dan strategi tertentu, dengan demikian, kemungkinan besar bisa menjadi lebih efektif terhadap tercapainya respons-respons yang berbeda.

Protes yang disertai dengan kekerasan sebagai strategi akan cenderung memperoleh kemenangan simbolis (terbukanya akses) ketimbang perubahan aktual. Kekerasan akan memberikan sumber daya yang cukup bagi organisasi gerakan untuk melakukan tawar-menawar terbukanya akses, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan respons kebijakan, hasil, dan dampaknya. Demikian pula taktik yang mengacaukan bisa membantu organisasi gerakan memenangkan ruang di dalam agenda politik atau adopsi legislasi, namun harus dicatat penyelenggaraan legislasi masih membutuhkan kecakapan teknis dan legal, serta kapasitas untuk memonitor aktivitas para pelaku legislasi tersebut.³⁵

Namun demikian, pengukuran sedemikian ini tentu saja problematis dan terkesan positivistik, khususnya bagi ahli-ahli kulturalis seperti dalam perspektif gerakan sosial baru. Bagi mereka, kesuksesan gerakan sosial tidaklah harus selalu diukur dengan respons- respons yang bersifat struktural atau produk kebijakan tertentu. Efek gerakan sosial bisa juga dilihat dari pengaruhnya di dalam perubahan kultural yang tidak selalu bisa diukur secara ajeg, yakni dengan memperkenalkan istilah kode-kode baru. Gerakan sosial juga memiliki kapasitas dalam mendorong isu-isu tertentu menjadi tema dan dirasa penting di dalam perdebatan publik. Atau gerakan sosial juga bisa memprovokasi sensitivitas aktor-aktor di arena politik dan

³⁵ Burstein, *Ibid*, hlm. 284.

arena publik secara luas untuk bekerja sesuai dengan tujuan-tujuan Gerakan.³⁶

1.5.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Gerakan Sosial

Pada prinsipnya, setiap masyarakat tidak dalam posisi diam atau stagnan. Dalam setiap perkembangannya masyarakat senantiasa mengalami proses perubahan demi perubahan. Perubahan dapat berupa suatu kemajuan (*progress*) atau bahkan sebaliknya berupa suatu kemunduran. (*regress*). Proses perubahan dalam masyarakat ini mencakup berbagai hal yang kompleks. Seperti pendapat Soerjono Soekanto (2012) bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan dinamika sebagai inti jiwa masyarakat. dan untuk mempelajari suatu gerakan sosial kita tidak bisa melihatnya lepas dari perkembangan masyarakat.³⁷ Gerakan sosial merupakan akibat atau efek lanjut dari berbagai proses dalam masyarakat.

Kapasitas dalam mengelaborasi dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung serta kapasitas dalam meminimalisir faktor-faktor penghambat menjadi hal penting untuk memaksimalkan gerakan sosial yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Leon Trotsky (2009) seorang organisir

³⁶ Porta, *Ibid*, hlm.236

³⁷ Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012). hlm. 259

haruslah mampu menerangkan hubungan persoalan-persoalan dalam gerakan, bahkan jika secara umum, seseorang harus mengingat dan merumuskannya dalam bentuk programatik perjuangan rakyat.³⁸ Salah satu faktor pendukung bagi efektifitas dan keberlangsungan gerakan sosial adalah keberadaan organisasi. Sedangkan organisasi sebagai alat perjuangan bermakna sebagai, pencerminan atas ideologi dan program-program perjuangan yang berkesesuaian dengan visi atau harapan gerakan itu sendiri.

Faktor pendukung lainnya selain keberadaan organisasi gerakan adalah peran kepeloporan atau peran kepemimpinan dalam perjuangan. Keberadaan seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan dimana tujuan kelompok yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami dinamika, misalnya: peran pemimpin sebagai penengah apabila muncul silang pendapat yang alot antar anggota kelompok atau antar organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Antonio Gramsci dalam Abdul Wahab Situmorang (2013) keberadaan organisasi rakyat saja tidak cukup membangkitkan sebuah revolusi kelas, hal lain yang diperlukan ialah upaya besar yang dilakukan oleh intelektual organik individu-individu yang berasal dari masyarakat dan memiliki fungsi, kecakapan dan

³⁸ Trotsky Leon, *Revolusi Permanen: teori revolusi sosialis untuk dunia ketiga*, (Yogyakarta: Resisr book, 2009), hlm.140.

kapasitas intelektual untuk menghalau serangan-serangan dari luar serta meretas budaya kapitalisme yang merasuk ke masyarakat.³⁹

Keberadaan program-program perjuangan juga menjadi faktor pendukung dari efektifitas gerakan sosial yang dibangun. Olehnya, programatik perjuangan haruslah dirumuskan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan gerakan. Kesalahan dalam merumuskan program perjuangan secara otomatis menjadi ketidakmampuan massa yang sedang bergerak dalam menjawab kontradiksi-kontradiksi terpokok mereka.

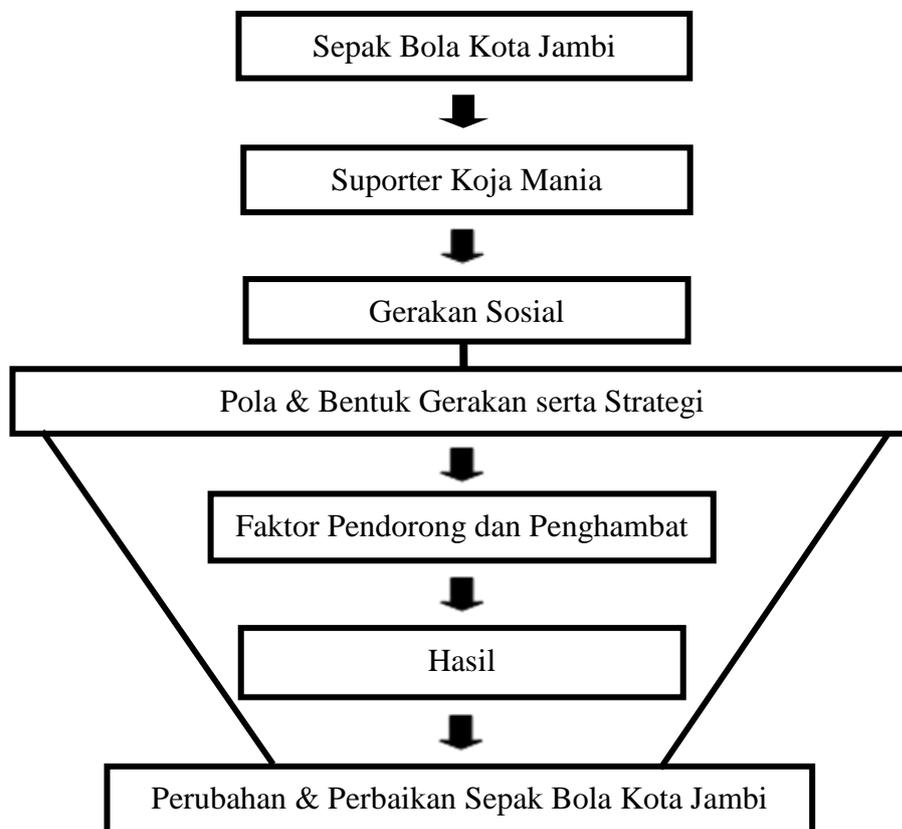
Pengelolaan pendanaan tentunya memberikan kontribusi positif bagi gerakan kelompok yang sedang berjuang, selain kebutuhan-kebutuhan organisasi dan perjuangan dapat terpenuhi program ini juga melatih praktek kolektifitas dalam setiap proses dan tahapannya. Begitu pula pula dengan program pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pendorongan maju kapasitas intelektual para anggota organisasi, maupun memberikan prespektif yang inklusif kepada masyarakat umum.

Dalam perjalannya gerakan sosial juga mendapati rintangan demi rintangan sebagai faktor penghambat efektifitas gerakan yang dibangun. Faktor-faktor penghambat tersebut seperti: minimnya sumber daya yang akan diolah dan dikembangkan, kurangnya keterlibatan aktif anggota itu sendiri dan belum terbangunnya jaringan lintas sektor perjuangan dengan

³⁹ Situmorang, *Ibid*, hlm.22

gerakan-gerakan kesetaraan yang lain.⁴⁰ Seperti yang diungkapkan Wallace, bahwa kita tidak bisa selamanya merindukan kedatangan militan sejati yang akan terus berkarya dan berlawan di bawah keterbatasan. Justru, menjadi masalah besar jika keterbatasan itu ada dan kita tidak melakukan apa-apa untuk meretasnya.⁴¹

1.6. Kerangka Pikir



⁴⁰ Marewa Baso, *Gerakan Sosial Penyandang disabilitas di Kota Makassar* (Makassar : Prodi Sosiologi) hlm.8

⁴¹ Eric R. Wolf. *Perang Petani*, (Yogyakarta: Insist Press 2004), hlm. 82

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dilihat bahwa gerakan sosial Koja Mania dalam upaya membangun sepak bola di Kota Jambi terjadi karena faktor sepak bola itu sendiri. Gerakan yang dilakukan tentu memiliki pola dan bentuk yang terjadi untuk didefinisikan seperti ini berupa adanya awal terbentuknya serta bentuknya yang kemudian diarahkan kepada pemerintah melalui cara dan strategi untuk mempengaruhi kebijakan tentang perbaikan sepak bola di Kota Jambi. Dalam sebuah gerakan tentu adanya faktor pendorong dan penghambat untuk yang menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai untuk menghasilkan perubahan dan perbaikan sepak bola Kota Jambi.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan awal penelitian yang kemudian menjadi rujukan untuk langkah apa yang harus diambil untuk menyikapi data yang didapat. Hal lainnya, metode kualitatif digunakan karena dapat mencoba masuk lebih dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Metode kualitatif yang digunakan untuk memberikan/mencari penjelasan atas alasan mengapa ada permasalahan yang diangkat oleh penulis. Data penelitian yang didapatkan dengan cara langsung terjun ke lapangan dan bersentuhan langsung dengan *field of research*, dimana penulis berkomunikasi langsung dengan sumber data atau narasumber. Konsep-konsep yang ada dalam kerangka pemikiran nantinya akan digunakan

sebagai uji konsep. Pada dasarnya, penggunaan metode kualitatif dalam metode penelitian penulis ini, berdasarkan pertanyaan penelitian.⁴²

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilatar belakangi fenomena yang terjadi antara suporter Koja Mania sebagai pendukung klub sepak bola di Kota Jambi yang berada di Kota Jambi. Pertimbangan penulis meneliti lokasi ini guna memperoleh keterangan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok suporter Koja Mania dalam upaya membangun sepak bola di Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder.

⁴² Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm 34-35

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴³ Dalam hal ini tentu yang memiliki informasi jelas adalah orang-orang yang terlibat dalam Gerakan yang terjadi seperti, Kordinator Koja Mania dan Anggota Koja Mania yang mengetahui kejadian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain berupa literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal dan data pendukung yang diperoleh peneliti dari sumber informasi kemudian dikumpulkan selama proses penelitian.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini, baru kemudian peneliti menentukan berapa jumlah

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 225

informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatannya dengan objek penelitian.⁴⁴

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik sampling *snowball (snowball sampling)* atau bola salju, yakni penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang di perlukan adalah teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian informan ini diminta memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel.⁴⁵

Teknik ini seperti salju yang menggulung dan perlahan-lahan membesar. Saat memilih informan, peneliti mulai dengan satu orang yang dianggap paham tentang masalah dalam penelitian ini. Namun, karena peneliti merasa data yang diperoleh kurang lengkap, peneliti meminta informan pertama untuk menemukan informan lain yang juga memiliki pengetahuan tentang masalah penelitian. Proses ini terus berlanjut hingga jumlah informan bertambah banyak.

Berdasarkan teknik tersebut dalam memilih informan, peneliti memilih beberapa orang yang dapat membantu berdasarkan saran dari informan utama yang dianggap memiliki pengetahuan lebih tentang kejadian yang diteliti, yaitu Ketua/kordinator Koja Mania. Tokoh ini

⁴⁴ Fisipol Universitas Jambi, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (2017), hlm 16.

⁴⁵ Sugiono, *Ibid.* hlm 276

memiliki informasi atau pengetahuan yang diperlukan dan relevan dengan tugasnya.

Tabel. 2
Informan Kunci Penelitian

No	Informan	Keterangan	Alasan
1	Hidayat	Ketua/Koordinator Koja Mania	Mengetahui arah tujuan dan gerakan Koja Mania

Informan utama dalam penelitian ini adalah Hidayat yang menjabat sebagai Ketua atau koordinator Koja Mania. Kriteria ini dinilai dari partisipasinya secara langsung dalam aksi yang dilakukan.

Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga memiliki informan tambahan yang dapat membantu penelitian dengan memberikan informasi. Informan tambahan ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang lebih baik.

Tabel. 3
Informan Pendukung Penelitian

No	Informan	Keterangan	Alasan
1	Dodi Febriansyah	Anggota/ pengurus Kojamania	Mengetahui Gerakan Kojamania
2	Fram Triadi	Anggota/ pengurus Kojamania	Mengetahui Internal dan Kepengurusan Koja Mania
3	Endarman Saputra	Akademisi, pusat kajian olahraga & sepak bola	Mengetahui kajian pengembangan olahraga sepak bola

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan dua cara yaitu bertemu langsung dan via daring.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi dapat berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data didapat melalui elektronik dan media sosial Instagram @kojmania.

1.7.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara:⁴⁶

a. Reduksi Data

Proses dimana seorang peneliti melakukan pendataan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan data dengan sistematis sesuai dengan yang telah direncanakan. Penyajian bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.⁴⁷

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagian hasil dari kesimpulan.

⁴⁶ Bungin dan Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Edisi ke empat 2012), hlm. 150

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2008),hlm. 123

1.7.8. Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dengan berbagai sumber data.

Dalam Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode:

- a. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi dengan metode adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.